

ABSTRAK

Laila Umar Bobsaid, 1860101223227, Praktik Sewa Menyewa Pohon Buah Duku dalam Perspektif Fiqh Mazhab (Studi Kasus Desa Cepoko Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing Dr. Fathul Ihsani, S.Sy., M.H.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Fiqh, Mazhab

Penelitian ini membahas tentang praktik akad sewa menyewa pohon buah duku yang dilakukan masyarakat Desa Cepoko. Akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah akad secara lisan. Sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Cepoko sebagian besar berawal dari hubungan utang piutang. Risiko yang timbul selama perjanjian pun ditanggung oleh pihak penyewa. Sewa menyewa akan berakhir apabila salah satu pihak tidak memperpanjang waktu sewa karena alasan tertentu, seperti ketidakmaksimalan pohon buah duku yang berbuah.

Fokus penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana praktik sistem sewa menyewa pohon buah duku yang dilakukan masyarakat di Desa Cepoko Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk?. (2) Bagaimana perspektif fiqh mazhab dalam praktik sewa menyewa pohon buah duku yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cepoko Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk?.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data (*data collecting*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusions drawing and verification*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik sewa-menyewa pohon buah duku yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cepoko adalah dengan cara kesepakatan yang dilakukan lisan antara pemilik pohon dan penyewa yang untuk diambil buah dukunya dalam jangka waktu tertentu yaitu tahunan (1-10 tahun) dengan imbalan berupa pembayaran oleh pihak penyewa. Penyewa menyerahkan uang sewa kepada pemilik pohon pada saat musim pertama diawal tahun sewa, dimana harga sewa biasanya adalah hasil kalkulasi atau perhitungan berdasarkan keadaan buah dan pohon buah duku di awal akad sewa, karena buah musim selanjutnya belum tentu sebaik tahun pertama. Munculnya praktik sewa menyewa pohon buah duku di Desa Cepoko pada awalnya dilatarbelakangi oleh adanya hubungan utang piutang antara pemilik pohon dengan pihak yang kemudian menjadi penyewa. (2) Praktik sewa-menyewa pohon buah duku dalam pandangan fiqh empat mazhab diperbolehkan menyewa pohon duku untuk di ambil buahnya yang termasuk dalam akad ijarah seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Cepoko. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan ketentuan para mazhab dalam praktik sewa menyewa pohon buah duku yang dilakukan masyarakat desa cepoko , yaitu antara lain; (a) Akad yang dilakukan oleh masyarakat desa cepoko menggunakan akad lisan yang telah membahas terkait jangka waktu sewa pohon buah duku secara jelas. Maka berdasarkan pendapat mazhab hanafi, maliki, syafi' i, dan hanbali terkait kejelasan waktu sewa telah terpenuhi dan diterapkan oleh masyarakat Desa Cepoko, (b) Dalam sewa menyewa yang dilakukan masyarakat desa cepoko bermula ketika pemilik pohon yang tidak mampu melunasi utangnya kemudian menawarkan pohon buah dukunya untuk disewakan kepada pihak pemberi pinjaman. Maka praktik tersebut masih dapat dibenarkan menurut sebagian pendapat ulama yaitu mazhab Maliki dan Hambali. Namun praktik tersebut tidak sesuai dengan pandangan Hanafi dan Syafi'i. (c) Apabila terjadi gagal panen buah duku, maka masa sewa akan diperpanjang hingga musim panen berikutnya. Namun apabila hasil panen buah duku menurun, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak penyewa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesepakatan mengenai pembagian risiko dalam akad sewa menyewa tersebut yang sesuai dengan mazhab Hanafi, Syafi' i, Maliki dan Hanbali. (d) Berdasarkan temuan penelitian di Desa Cepoko terdapat kasus ketika penyewa meninggal dunia, namun pengelolaan pohon buah duku tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat secara tidak langsung menganggap akad sewa menyewa tersebut dapat diwariskan. Maka hal tersebut sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan keberlanjutan akad hingga masa sewa berakhir. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang melarangnya.

ABSTRACT

Laila Umar Bobsaid, 1860101223227, The practice of leasing duku fruit trees from the perspective of fiqh mazhab (Case Study of Cepoko Village, Berbek Subdistrict, Nganjuk Regency), Sharia Economic Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, Advisor Dr. Fathul Ihsani, S.Sy., M.H.

Keywords: Leasing, Islamic Jurisprudence, Schools.

This study examines the practice of leasing durian trees among the residents of Cepoko Village. The agreements are made verbally. Any risks arising during the lease period are borne by the lessee. The lease terminates if either party chooses not to renew it for specific reasons, such as the durian tree failing to bear fruit optimally.

The focus of this study includes: (1) How is the duku fruit tree lease system practiced by the community in Cepoko Village, Berbek Subdistrict, Nganjuk Regency?. (2) What is the perspective of the fiqh mazhab in the practice of leasing duku fruit trees by the community in Cepoko Village, Berbek Subdistrict, Nganjuk Regency?.

The research method used is a qualitative approach with a field research design. The data collection techniques used in this study include observation, in-depth interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used in this study consist of data collection, data presentation, drawing conclusions, and verification.

Research findings indicate: (1) The practice of leasing duku fruit trees among the residents of Cepoko Village is based on a verbal agreement between the tree owner and the lessee, under which the lessee is permitted to harvest the duku fruit for a specific period—typically ranging from one to ten years—in exchange for payment made by the lessee. The renter pays the rent to the tree owner at the start of the first season of the lease, where the rental price is typically calculated based on the condition of the duku fruit and the tree at the beginning of the lease agreement, as the fruit in subsequent seasons may not be as good as in the first year. The emergence of the practice of leasing duku fruit trees in Cepoko Village was initially driven by the existence of a debt-credit relationship between the tree owner and the party who later became the lessee. (2) According to the four schools of Islamic jurisprudence, the practice of leasing duku fruit trees is permissible; specifically, leasing a duku tree to harvest its fruit falls under the *ijarah* contract, as practiced by the residents of Cepoko Village. However, there are some differences in the rulings of the schools regarding the practice of leasing duku fruit trees carried out by the residents of Cepoko Village, including the following: (a) The agreement entered into by the residents of Cepoko Village is a verbal agreement that clearly specifies the lease term for the duku fruit trees. Therefore, based on the opinions of the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools regarding the clarity of the lease period, the requirements have been met and implemented by the people of Cepoko

Village. (b) The lease agreement entered into by the people of Cepoko Village began when the tree owner, unable to repay his debt, offered his duku fruit tree for lease to the lender. Therefore, this practice is still considered permissible according to the opinions of some scholars, namely the Maliki and Hanbali schools. However, this practice does not align with the views of the Hanafi and Shafi'i schools. (c) In the event of a duku fruit crop failure, the lease period will be extended until the next harvest season. However, if the duku fruit yield decreases, the loss is borne by the lessee. This provision indicates that the community has reached an agreement regarding risk sharing in the lease agreement, which aligns with the Hanafi, Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools of thought. (d) Based on research findings in Cepoko Village, there are cases where the tenant has passed away, yet the management of the duku fruit trees continues to be carried out by the heirs. This situation indicates that the local community indirectly considers the lease agreement to be inheritable. This aligns with the views of the Hanafi and Hanbali schools of thought, which permit the continuation of the agreement until the lease term expires. This differs from the Shafi'i school, which prohibits it.

ملخص

لبنى عمر بوبسايد، ١٨٦٠١٠١٢٢٣٢٢٧، ممارسة تأجير أشجار الدوكو من منظور المذاهب الفقهية (دراسة حالة قرية سيوكو، منطقة بيربيك، محافظة نغانجوك)، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الإسلامي، جامعة سيد علي رحمت الله الإسلامية الحكومية في تولونغونغونغ. دكتور. فاتور إحساني، بكالوريوس في الشريعة، مستشار قانوني.

الكلمات المفتاحية: الإيجار، الفقه، المذاهب.

تتناول هذه الدراسة ممارسات عقود إيجار أشجار الدوكو التي يتبعها سكان قرية سيوكو. وتتم هذه العقود شفويًا. كما يتحمل المستأجر المخاطر التي تنشأ خلال مدة العقد. وينتهي عقد الإيجار إذا لم يتم أحد الطرفين بتمديد مدة الإيجار لأسباب معينة، مثل عدم إنتاج أشجار الدوكو للثمار بالشكل الأمثل.

تشمل محاور البحث ما يلي: (١) كيف تتم ممارسة نظام تأجير أشجار الدوكو من قبل السكان في قرية سيوكو، منطقة بيربيك، مقاطعة نغانجوك؟ (٢) ما هو المنظور الفقهي للمذهب فيما يتعلق بممارسة تأجير أشجار الدوكو التي يقوم بها سكان قرية سيوكو في منطقة بيربيك بمقاطعة نغانجوك؟

تم استخدام منهجية بحثية نوعية في شكل بحث ميداني. وتضمنت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث الملاحظة والمقابلات المعمقة والتوثيق. أما تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث فهي جمع البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص الاستنتاجات والتحقق منها.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: (١) تتم ممارسة تأجير أشجار الدوكو التي يقوم بها سكان قرية سيوكو عن طريق اتفاق شفهي بين مالك الشجرة والمستأجر، حيث يُسمح للمستأجر بقطف ثمار الدوكو خلال فترة زمنية محددة، وهي فترة سنوية (١-١٠ سنوات)، مقابل دفع مبلغ مالي من جانب المستأجر. يسلم المستأجر مبلغ الإيجار لمالك الشجرة في الموسم الأول في بداية سنة الإيجار، حيث يتم تحديد سعر الإيجار عادة بناءً على حالة الثمار وشجرة الدوكو في بداية عقد الإيجار، لأن ثمار الموسم التالي قد لا تكون بنفس جودة الموسم الأول. ظهرت ممارسة تأجير أشجار الدوكو في قرية سيوكو في البداية على خلفية وجود علاقة دين ودين بين مالك الشجرة والطرف الذي أصبح لاحقًا المستأجر. (٢) ممارسة تأجير أشجار الدوكو من وجهة نظر الفقه في المذاهب الأربعة: يُجوز تأجير شجرة الدوكو لقطف ثمارها، وهو ما يندرج ضمن عقد الإجرة كما

يمارسه سكان قرية سيوكو. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات في أحكام المذاهب بشأن ممارسة تأجير أشجار الدوكو التي يقوم بها سكان قرية سيوكو، ومن بينها ما يلي: (أ) العقد الذي أبرمه سكان قرية سيوكو هو عقد شفهي يتضمن بنوداً واضحة بشأن مدة إيجار أشجار الدوكو. وبناءً على آراء المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، فإن شرط وضوح مدة الإيجار قد تم استيفاءه وتطبيقه من قبل سكان قرية سيوكو، (ب) يبدأ عقد الإيجار الذي أبرمه سكان قرية سيوكو عندما يعرض مالك الشجرة، الذي لا يستطيع سداد ديونه، شجرة الدوكو الخاصة به للتأجير إلى المقرض. وبالتالي، فإن هذه الممارسة لا تزال مقبولة وفقاً لبعض آراء العلماء، أي المذهب المالكي والحنبلي. لكن هذه الممارسة لا تتوافق مع رأي المذهب الحنفي والشافعي. (ج) في حالة فشل محصول شجرة الدوكو، يتم تمديد مدة الإيجار حتى موسم الحصاد التالي. ولكن إذا انخفض محصول شجرة الدوكو، فإن الخسارة يتحملها المستأجر. تشير هذه الشروط إلى أن المجتمع قد توصل إلى اتفاق بشأن تقاسم المخاطر في عقد الإيجار هذا، وهو ما يتوافق مع المذاهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. (د) استناداً إلى نتائج البحث في قرية سيوكو، هناك حالات توفى فيها المستأجر، ومع ذلك استمر الوراثة في إدارة أشجار فاكهة الدوكو. ويشير هذا الوضع إلى أن المجتمع المحلي يعتبر بشكل غير مباشر أن عقد الإيجار قابل للتوريث. ويتوافق ذلك مع آراء المذاهب الحنفي والحنبلي، التي تجيز استمرار العقد حتى انتهاء مدة الإيجار. وهذا يختلف عن المذهب الشافعي الذي يحظر ذلك.